

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Transparansi Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso)

Mochamad Hidayatus Sholihin^{1*}, Maslichah², Dyah Arini Rudhiningtyas³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: muhammadhidayatus87@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of accrual-based accounting systems has become a crucial effort to enhance transparency and accountability in village financial management. This study aims to examine the influence of accrual-based accounting implementation on the level of financial transparency in Ampeldento Village. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document review. The findings indicate that the adoption of accrual accounting via the Siskeudes application can improve the clarity of financial reports and information openness to the public. The main obstacles include limited understanding among village officials and technical issues with network infrastructure. The results affirm that regulation, training, and community participation are key supporting factors, while internal and external challenges pose significant hurdles. Scientifically, this research enriches the literature on village financial management based on accrual accounting and provides strategic recommendations for optimal implementation.

Keywords: Accrual accounting, village financial transparency, village financial management, village financial system

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi syarat utama agar pemerintah desa dapat menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara efisien (Fitri & Suwandi, 2022; Irawati & Kurniawan, 2020). Semakin pentingnya aspek ini diketahui seiring dengan meningkatnya dana desa yang dialokasikan melalui APBN, sehingga desa diharapkan mampu mengelola anggaran yang besar secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual menjadi instrumen penting dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, termasuk di tingkat desa. Sistem ini mencatat transaksi saat peristiwa terjadi, bukan hanya saat kas masuk atau keluar, sehingga dapat memberikan gambaran lengkap mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah (Putra & Varina, 2021; KSAP, 2010). Pemerintah melalui PP No. 71 Tahun 2010 mewajibkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagai bagian dari reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia.

Namun, pelaksanaan akuntansi akrual di tingkat desa tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Menurut laporan BPK (2023), kendala utama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kompetensi aparat desa, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai (Safrizan et al., 2025; Lamonisi, 2016). Teknis teknis seperti gangguan jaringan dan kekurangan perangkat juga menjadi tantangan dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menjadi alat utama pencatatan transaksi. Meski begitu, penelitian Safari et al. (2024) dan Mutiara Mardaw et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor regulasi yang jelas, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan dari masyarakat dapat mempercepat keberhasilan implementasi akrual di desa. Dukungan penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada penerapan akrual di tingkat pemerintah daerah (Idrus, 2018; Supraja, 2019), sementara studi mengenai penerapan di tingkat desa masih relatif terbatas. Beberapa penelitian seperti Ferarow & Suprihanto (2018) dan Mutiara Mardaw et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan

Siskeudes berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan desa, namun kajian mendalam tentang faktor pendukung dan hambatan di konteks desa tertentu belum banyak dilakukan. Di sinilah muncul peluang penelitian ini untuk memperluas literatur mengenai akuntansi akrual dengan fokus pada pengelolaan keuangan desa, yang merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori *Good Governance*

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum (UNDP, 1997; Irawati & Kurniawan, 2020). Dalam konteks desa, prinsip ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Fitri & Suwandi, 2022).

2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan sistem pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik (Nordian & Hertianti, 2019). Tujuan utama akuntansi pemerintahan adalah menyajikan informasi yang relevan, andal, dan transparan sebagai dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Rizal et al., 2019).

3. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam hal keuangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban publik (Supraja, 2019; Idrus, 2018). Tantangan umum di daerah adalah keterbatasan kapasitas aparatur dan konsistensi penerapan regulasi.

4. Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Sistem akuntansi berbasis akrual diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2010). Sistem ini mencatat pendapatan, beban, aset, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya saat kas diterima atau dikeluarkan (Putra & Varina, 2021). Penerapan akrual dinilai mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Safari et al., 2024; Safrizan et al., 2025).

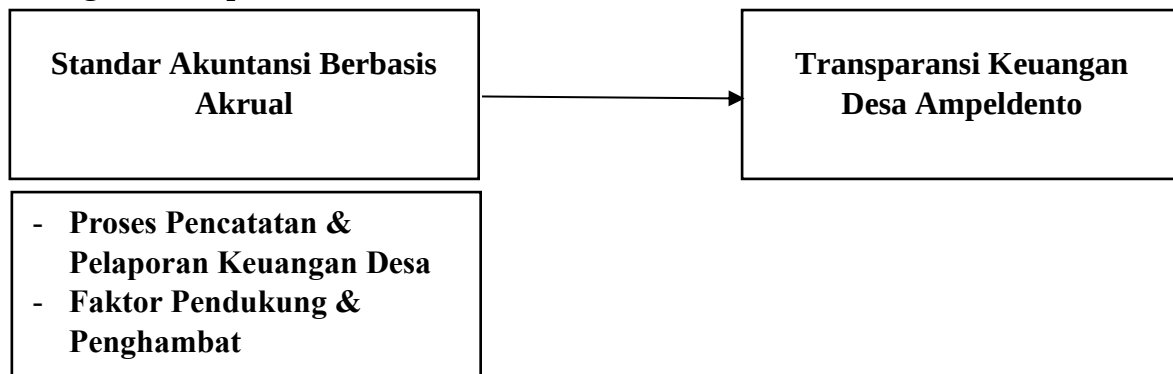
5. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat (Sayuti et al., 2018). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan laporan keuangan, musyawarah desa, dan penyampaian informasi melalui papan pengumuman atau media publikasi (Ferarow & Suprihanto, 2018; Ferlia et al., 2023).

6. Profil Sistem Akuntansi Desa Ampeldento

Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak 2016 sebagai instrumen pengelolaan dan pelaporan keuangan. Aplikasi ini mendukung pencatatan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Implementasi Siskeudes memungkinkan pemerintah desa menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, meski masih menghadapi kendala keterbatasan pemahaman aparatur serta masalah teknis infrastruktur (Mutiara Mardaw et al., 2022; Polidu et al., 2025).

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Kantor Desa Ampeldento Kecamatan Krangploso. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh implementasi sistem akuntansi berbasis akraual terhadap transparansi keuangan pemerintahan daerah khususnya pada tingkat desa.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berbasis akraual dalam pengelolaan keuangan desa. Waktu penelitian berlangsung dari April 2025 hingga Oktober 2025.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak internal pemerintahan desa dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan serta pengawasan keuangan desa. Informan dipilih secara purposive, meliputi: Kepala Desa Ampeldento, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua RT 17, Ketua Kelompok Ternak Desa Ampeldento.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu:

- **Wawancara mendalam:** dilakukan dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat mengenai implementasi akuntansi berbasis akraual dan transparansi keuangan desa.
- **Observasi langsung:** untuk melihat praktik pengelolaan keuangan desa, pelaporan melalui Siskeudes, dan mekanisme transparansi seperti musyawarah desa serta papan informasi.
- **Dokumentasi:** berupa arsip laporan keuangan desa, profil desa, dokumen Siskeudes, notulen musyawarah, dan peraturan desa terkait pengelolaan keuangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan hasil, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik guna membandingkan serta mengonfirmasi konsistensi informasi dari berbagai perspektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ampeldento telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akraual melalui aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016. Penerapan sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi tidak hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga mencakup pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual. Selain itu, penerapan akrual juga berdampak positif pada keterbukaan informasi keuangan desa. Transparansi diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti publikasi laporan keuangan secara berkala, penyampaian informasi dalam musyawarah desa, pemasangan papan informasi, serta penggunaan media publikasi desa. Praktik ini tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Meski demikian, keterbatasan literasi keuangan di kalangan masyarakat masih menjadi kendala, karena tidak semua warga mampu memahami isi laporan keuangan yang disajikan.

Penelitian menemukan bahwa implementasi akrual di Desa Ampeldento dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang cukup signifikan. Faktor pendukung antara lain adanya regulasi yang jelas melalui PP No. 71 Tahun 2010, keberadaan aplikasi Siskeudes yang terintegrasi, serta pelatihan aparatur desa yang secara bertahap meningkatkan pemahaman tentang akuntansi akrual. Namun, masih terdapat hambatan yang mengurangi efektivitas penerapan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis memadai, gangguan teknis aplikasi dan jaringan. Secara teoritis, temuan ini memperkuat hasil penelitian Safari et al. (2024) dan Ferarow & Suprihanto (2018) bahwa akrual mampu meningkatkan transparansi keuangan. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menyoroti konteks desa yang memiliki keterbatasan unik, berbeda dengan studi sebelumnya seperti Idrus (2018) dan Supraja (2019) yang lebih berfokus pada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas akuntansi akrual di desa sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur, dukungan teknologi, dan tingkat literasi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Desa Ampeldento telah berjalan melalui penggunaan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016. Implementasi ini mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sistem berbasis kas, serta mendorong keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat melalui publikasi laporan, musyawarah desa, papan informasi, dan media publikasi desa. Dengan demikian, akuntansi berbasis akrual berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi keuangan desa.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan sistem akrual masih menghadapi sejumlah hambatan. Kendala utama berasal dari keterbatasan pemahaman aparatur desa, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Siskeudes, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Di sisi lain, faktor regulasi pemerintah, pelatihan aparatur, serta partisipasi masyarakat menjadi elemen penting yang mendukung keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta perbaikan infrastruktur teknologi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar penerapan akrual di desa dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada satu desa, yaitu Desa Ampeldento, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh desa dengan kondisi yang berbeda. Kedua, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, sehingga analisis lebih bersifat deskriptif dan mendalam namun tidak menyajikan data kuantitatif yang dapat memperkuat hubungan antar variabel. Ketiga, keterbatasan waktu dan akses data menyebabkan informasi yang diperoleh masih bergantung pada keterbukaan informan, sehingga dimungkinkan adanya bias subjektif. Keempat, tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah juga menjadi tantangan dalam menggali perspektif partisipasi publik secara lebih luas.

Saran

1. **Bagi Pemerintah Desa Ampeldento** : Disarankan agar pemerintah desa meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan terkait akuntansi berbasis akrual dan penggunaan aplikasi Siskeudes, sekaligus memperbaiki infrastruktur teknologi guna meminimalisir kendala teknis. Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat budaya transparansi dengan memastikan laporan keuangan selalu dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.
2. **Bagi Masyarakat Desa Ampeldento** : Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengikuti musyawarah desa serta kegiatan literasi keuangan agar mampu memahami laporan keuangan yang disajikan. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya** : Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas objek kajian ke desa lain atau membandingkan beberapa desa, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap transparansi keuangan desa. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran juga dapat menambah kedalaman analisis dan memperkuat validitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferarow, & Suprihanto. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(2), 45–58.
- Ferlia, A., Rahayu, T., & Santoso, B. (2023). Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik: Studi pada pemerintah desa. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 9(1), 77–91.
- Fitri, R., & Suwandi, A. (2022). Good governance dan transparansi keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 233–245.
- Idrus, M. (2018). Pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 7(1), 14–25.
- Irawati, D., & Kurniawan, H. (2020). Good governance dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 105–119.
- KSAP. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Lamonisi, S. (2016). Analisis penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 65–78.
- Mutiara Mardaw, A., Dewi, R., & Santosa, H. (2022). Efektivitas Siskeudes dalam transparansi keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pemerintahan Desa*, 4(1), 21–34.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Polidu, Y., Sumual, H., & Wenas, J. (2025). Hambatan transparansi dana desa di era akuntansi akrual. *Jurnal Pembangunan dan Akuntansi Publik*, 11(1), 50–63.
- Pongtambing, R. (2018). Kebutuhan sumber daya manusia dalam akuntansi pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Daerah*, 6(2), 99–110.
- Putra, R., & Varina, L. (2021). Akuntansi akrual dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 55–70.
- Rizal, M., Setiawan, D., & Nurhayati, S. (2019). Transparansi dalam akuntansi pemerintahan: Perspektif partisipasi publik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 89–103.
- Safari, H., Nugroho, A., & Wahyudi, R. (2024). Pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 15(2), 120–136.

- Safrizan, I., Rahmawati, & Jannah, F. (2025). Optimalisasi akuntansi akrual di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Daerah*, 12(1), 33–47.
- Sayuti, A., Darmawan, R., & Hamzah, S. (2018). Keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 200–212.
- Supraja, I. (2019). Implementasi SAP berbasis akrual dan efektivitas pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Audit Daerah*, 8(1), 41–56.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.